

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia yang bersifat universal dan bersifat sangat penting untuk umat manusia. Di Indonesia sendiri pendidikan merupakan sebuah sarana yang strategis untuk meningkatkan kualitas sebuah bangsa. Pendidikan menggambarkan interaksi pendidik dengan peserta didik guna mencapai visi pendidikan yang berlangsung dalam lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Pendidikan yang dilaksanakan semua sama, yakni memberi bimbingan agar peserta didik dapat hidup mandiri sehingga dapat melanjutkan dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Melalui pendidikan yang terprogram dan terkelola dengan baik dan intensif, titik optimum usaha pendidikan akan terwujud. Pendidikan dikatakan berhasil apabila mampu mengubah tingkah laku manusia kearah yang positif.

Pada hakikatnya pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, mengubah perilaku dan meningkatkan kualitas manusia menjadi lebih baik lagi sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang dan berubah.¹ Dikarenakan hal tersebut jika suatu bangsa ingin melakukan perubahan maka perubahan itu hanya dapat dilakukan oleh bangsa tersebut bukan bangsa lain. Begitu halnya dengan pendidikan, yang dapat melakukan perubahan dalam pendidikan adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan serta orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Namun pada kenyataannya, yang sering menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya peningkatan mutu pendidikan.

¹ Hidayatul muawanah, “*Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Tsanawiyah Alhidayah..*”, (fakultas tarbiyah, IAIN Salatiga : 2020). 1-2

Kebijakan paudisasi desa melalui Program 1 Desa 1 PAUD yang digulirkan pada tahun 2012 sebagai salah satu upaya perluasan dan pemerataan akses dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dapat dikatakan telah berhasil mendorong pertumbuhan PAUD di tanah air (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).² Dengan bukti dimana-mana baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan banyak didirikan sehingga saat ini mudah ditemukan satuan pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenis seperti Taman Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Bustanul Athfal (BA), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Direktorat PAUD Kemendikbud Muhammad Hasbi menyampaikan sekitar 41% program PAUD yang baru berhasil diimplementasikan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, dengan presentase desa di Indonesia yang memiliki PAUD masih berada di angka 72% dan masih sekitar 22 ribu desa yang belum memiliki PAUD untuk menunjang pendidikan anak oleh karena itu Kemendikbud sedang gencar untuk segera merealisasikan program ini supaya mencapai target 100 % dalam mewujudkan satu PAUD satu Desa untuk Generasi Emas Indonesia 2045.³

Keberhasilan mendorong pertumbuhan jumlah satuan pendidikan dalam rangka peningkatan APK PAUD sebagai mana dikemukakan diatas kelihatannya masih menyisakan banyak permasalahan mendasar. Salah satunya permasalahan yang dimaksud adalah mengenai kualitasnya yang dianggap belum seperti yang diharapkan. Artinya keberhasilan tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan kesuksesan dalam peningkatan mutunya. Bahkan kenyataannya hingga saat ini mutu PAUD masih menjadi

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 18 tahun 2018.

³ Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1399/pemerintah_dorong_program_satu_paud_satu_desa
(diakses pada 28 oktober 2021 pukul 12.00 WIB)

permasalahan aktual yang belum terpecahkan secara tuntas, disamping permasalahan pendidikan lainnya.

Dengan kata lain masih terjadi ketimpangan antara pemerataan akses dengan peningkatan mutunya sehingga memerlukan keseriusan berbagai pihak untuk mengatasinya. Sebenarnya upaya telah dilakukan untuk memecahkan masalah mutu pendidikan yang dimaksud. Salah satu di antaranya yang dianggap sangat mendasar dan strategis adalah dikeluarkannya kebijakan mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bahkan sebagai penjabaran dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas, secara teknik operasional telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014⁴ tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi : Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Di dalam peraturan tersebut telah dimuat secara rinci berbagai karakteristik yang merupakan standar minimal yang harus dipenuhi semua satuan PAUD.

Meskipun kebijakan ini bersifat mengikat yaitu memaksa semua lembaga layanan pendidikan di tanah air untuk melakukan upaya penyesuaian dengan acuan mutu di atas, namun kenyataannya secara umum belum berhasil seperti yang diinginkan. Bahkan disinyalir masih terjadi kesenjangan antara kuantitas dan kualitasnya. Artinya bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang ini masih harus melakukan berbagai langkah konkrit agar dapat menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan kriteria minimal sebagaimana

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No.137 tahun 2014.

tertuang dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu masih perlu adanya pedoman sebagai panduan dalam pelaksanaannya.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa telah terjadi reformasi total dalam pengelolaan pendidikan dari yang semula berbasis pemerintah (*state-based education*) menjadi berbasis satuan pendidikan yang dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) dan berbasis masyarakat atau disebut Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Education*). Artinya masyarakat diposisikan sebagai pihak yang harus ikut memikul tanggung jawab dalam keterlaksanaan layanan pendidikan sesuai standar yang ditentukan.⁶

Bahwa masyarakat memiliki peran sentral dan strategis dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan proses pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan proses pendidikan yang mengedepankan kontrol masyarakat local melalui partisipasi demokratis. Pendidikan berbasis masyarakat pada prinsipnya pendidikan yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat. Undang-undang system pendidikan nasional mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁷

Menurut *Resbin L. Sihite* peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi : sebagai sumber pendidikan, sebagai pelaku pendidikan, pelaksana pendidikan, pengguna hasil pendidikan, perencanaan pendidikan, pengawasan pendidikan, dan evaluasi program

⁵ T. H. Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Pengantar Manajemen (2011).

⁶ Imam Mahali, A. H. (2016). *Hand Book of Education Management*. Pranadamedia Group. Isnanto, I., & Yustika, Y. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Kelas Awal di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 1087. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.514>

⁷ Undang Ruslan Wahyudin, *Implementasi pendidikan berbasis masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan anak usia dini*, volume 6 (2021).

pendidikan. Agar pendidikan berbasis masyarakat berfungsi secara optimal, perlu dikelola dengan baik melalui manajemen yang efektif. Manajemen menurut *Terry* merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya. Sementara itu menurut *Robbins* dan *Coulter* proses manajemen merupakan serangkaian kegiatan kerja terus menerus yang dialami para manajer sewaktu mereka merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Berdasarkan uraian diatas maka manajemen pendidikan berbasis masyarakat tidak lain merupakan proses pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendaliannya, dengan tujuan utama yaitu memberikan layanan pendidikan terbaik sesuai kebutuhan masyarakat.⁸

Mengetahui bahwa dalam meningkatkan kualitas dan peningkatan mutu suatu lembaga pendidikan masyarakat sebagai *stakeholders* memiliki peran penting dan menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan generasi emas indonesia melalui pendidikan anak usia dini untuk itu menarik peneliti untuk mengetahui lebih lanjut serta mempelajari bagaimana Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

⁸ Undang Ruslan Wahyudin, 2021, *implementasi pendidikan berbasis masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan anak usia dini*, volume 6 issue 2 ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print) DOI: 10.31004/obsesi.v6i2.1357

B. Fokus Penelitian

Masalah atau problematika yang akan dicari melalui penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Perencanaan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Pengorganisasian Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri ?
4. Bagaimana Pengendalian Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri ?
5. Bagaimana Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Perencanaan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri
2. Mengetahui Pengorganisasian Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri

3. Mengetahui Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri
4. Mengetahui Pengendalian Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri
5. Mengetahui Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di RA Kusuma Mulia XVI Badas Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan keilmuan mengenai manajemen pendidikan berbasis masyarakat serta peningkatan mutu pendidikan dan implementasi nya pada lembaga pendidikan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis :

Dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam pendidikan serta membaaur dengan masyarakat supaya dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk peningkatan mutu pendidikan kedepannya.

- b. Bagi lembaga :

Sebagai bahan informasi kepada seluruh *stakeholders* lembaga serta menjadi bahan dan masukan untuk dikembangkan supaya lebih bijak dalam menghadapi problematikanya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kegiatan ini penulis memahami penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya :

1. Zulfa 'Ainurrosida, Magister Manajemen Pendidikan IAIN Ponorogo 2018, Partisipasi Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Mutu Madrasah Dengan hasil : 1) Perencanaan partisipasi masyarakat di MI Ma'arif Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah mencapai tahapan aspirasi masyarakat. Dimana masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk memberikan aspirasi terkait program kegiatan yang belum ada di sekolah dan masyarakat merasa sekolah perlu memprogramkannya. Selain menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, aspirasi masyarakat juga sangat penting untuk kemajuan sekolah. 2) pengorganisasian partisipasi masyarakat sudah sampai tahapan penetapan relasi antar organisasi. Dimana dalam setiap kegiatan diadakan rapat persiapan terlebih dahulu untuk menentukan tugas masing-masing divisi. 3) pengendalian masyarakat di MI Ma'arif Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah melakukan Evaluasi dalam pengendaliannya di setiap akhir kegiatan diadakan rapat yang wajib dihadiri oleh semua anggota divisi yang bertugas.
2. Trisandi dan Sedyanta Santosa, Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020, Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Daerah Perbatasan Sulawesi Tengah. Dengan hasil : 1) Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah, memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan sekolah yang dikembangkan oleh masyarakat. Beberapa tahap yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Masoni perbatasan Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis masyarakat yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Program yang telah dilaksanakan di

SMP KSM Sonit yaitu proses belajar mengajar, pramuka dan pengembangan budidaya rumput laut. Pelaksanaan pendidikan di Pulau Masoni, tidak berjalan secara baik karena terjadi beberapa hambatan, diantaranya, Pulau Masoni masuk daerah tertinggal, kondisi geografis, minimnya anggaran sekolah, kurangnya jumlah guru, peserta didik dan minimnya fasilitas sarana prasana sekolah.

3. Mohamad Slamet Arif, Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017, Penerapan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Rumah Tahfiz Al-Syamsiyah Sukoharjo. Dengan hasil : 1) Rumah Tahfidz al- Syamsiyah Sukoharjo dalam menerapkan pendidikan berbasis Masyarakat dengan melalui empat penerapan pada bidangnya masing-masing yaitu meliputi penerapan pada kurikulum dan kegiatan rutinitas keseharian, pemberdayaan masyarakat oleh Rumah Tahfidz al – Syamsiyah, serta peran partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan. Kendala - kendala dalam proses penyelenggaraan di rumah tahfidz al- Syamsiyah yaitu kurangnya kepedulian masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dan santriwati yang perlu dimotivasi untuk giat semangat dalam menghafal al-Quran.
4. Moh. Hasim, Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang 2007, Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Kalibening, Salatiga. Dengan hasil : Pelaksanaan prinsip pembelajaran berbasis masyarakat yang dilakukan oleh SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah memberikan implikasi luas tidak hanya pada perubahan pola belajar siswa. Akan tetapi juga mampu mempengaruhi paradigma guru dalam mengajar dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di SLTP Alternatif QT dengan mengedepankan kemandirian siswa dalam belajar melalui pendekatan kontekstual (CTL) mampu menciptakan hubungan kemitraan antara sekolah dengan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya lokal untuk menunjang proses pembelajaran di SLTP

Alternatif Qaryah Thayyibah terbukti mampu menentukan pembiayaan pendidikan. Berkat dukungan dan peran serta masyarakat SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah tetap eksis dan bertahan dan berhasil memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai pendidikan yang bermutu.

Dari keempat penelitian yang relevan yang telah dilakukan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu diantaranya : persamaannya adalah berfokus pada peran masyarakat sebagai *stakeholders* dalam menunjang pendidikan serta implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakatnya dalam meningkatkan mutu lembaga, sedangkan perbedaannya selain dari lokasi yang digunakan peneliti, terletak pada Teori yang digunakan dan sampel yang diambil yaitu terkait lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berada dalam naungan yayasan.